

Peranan Pemerintah Dalam Mengimplemntasikan Kebijakan Pembangunan SDM (Di Kelurahan Tewan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung)

Natalia Anastasya Sumuruk
F.D.J. Lengkong
Alden Laloma .

ABSTARCT: Every good areas of the city to the village level have programs of human resource development to its citizens. but whether the government has implemented its policy implementation is well or not in each region ? So that will impact the results.

The purpose of this study was to determine the role of government in implementing human resource development policy in the sub-district Tewan villages of Bitung city.

The method used in this study is a qualitative method , as well as to find the percentage of analytical techniques with the help of the formula $P = F / NX100$. Data sources and respondents were 14 respondents taken 6 staff employee in the office of the villages 8 community leaders. Data collection using questionnaire and with interview techniques assisted.

The results of data analysis showed : The Role of government in the implementation of human resource development policy is positive and highly significant, capable of both high and directed in improving standards of living.

Based on the results of these studies concluded that the role of government in implementing human resource development policy in the villages tewan of bitung city, the government has been able to implement a very good and high quality human resources development policy because it has been as expected and needed by the community.

Based on these conclusions suggested : Maintaining implementation pattern of development that has been done, focus on the implementation of human resource development in improving standards of living, continues to establish communication with all level of society in order to support the implementation of development.

Keywords : Role, Policy implementation

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Pembangunan adalah merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap-tahapan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan pancasila.

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan

nasional sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar 1945.makna dari pembangunan sendiri merupakan komitmen nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di atas, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang tepat,yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penyelenggara pemerintahan dan pembangunan itu sendiri. untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, maka pembangunan nasional dilaksanakan secara merata diseluruh pelosok tanah air baik dipusat kota,kecamatan sampai pada tingkat desa atau kelurahan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak 2001 mengandung konsekuensi yang cukup “menantang” bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah. Namun demikian, di sisi yang lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan daerah dari sentralistik menjadi desentralisasi, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lain. Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan di suatu kelurahan. Kelurahan merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Timbulnya motivasi pada diri seseorang tentu oleh adanya suatu kebutuhan hidup, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekundernya. Jika kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka seseorang akan giat bekerja sehingga kinerja dapat meningkat. Kinerja pemerintah kelurahan sebagai aparatur pemerintahan kelurahan tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya itu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu faktor pengalaman akan ikut mempengaruhi prestasi kerja (kinerja) dalam pelaksanaan tugas ke pemerintahannya.

Setelah melihat lebih kedalam, pembangunan SDM sangat begitu Penting,

karena merupakan potensi-potensi yang diperoleh manusia dan dihasilkan untuk sesuatu yang bermanfaat juga dalam pembangunan serta masyarakat yang ada. Sehingga pemerintah pun banyak menerapkan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan SDM. Tujuan dari penerapan kebijakan pemerintah melalui pembangunan SDM itu sendiri yaitu pemberdayaan masyarakat. Namun suatu pemerintah. Pembangunan SDM sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat, setiap daerah-daerah baik dari tingkat kota sampai ke kelurahan mempunyai program-program pembangunan SDM terhadap masyarakatnya, namun apakah di kelurahan Tewan pemerintah telah berperan baik atau tidak baik dalam implementasi kebijakan pembangunan SDMnya. Masalah yang penulis temui juga dari hasil observasi yang penulis dapat dari beberapa masyarakat yang ada, dalam implementasi kebijakan di kelurahan Tewan dalam halnya dengan pembangunan SDM yaitu dalam proses pembangunannya tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat, hal ini kemudian membuat masyarakat kurang mempedulikannya, bahkan tidak mendukung. Untuk itu sangat penting mengetahui sejauh mana dan bagaimana peranan pemerintah melibatkan diri kepada masyarakat dalam pengimplementasian kebijakan pembangunan SDM. Harapan penulis serta masyarakat kepada pemerintah dalam penerapan implementasi kebijakan pembangunan SDM di kelurahan Tewan yaitu pemerintah dapat melakukan kebijakan pembangunan SDM

yang baik, berkualitas dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya.

Oleh karena itu penulis dengan sangat berani meneliti masalah “ *Peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan SDM, suatu studi yang akan penulis teliti di kelurahan tewa kec. ranowulu kota bitung*”

METODOLOGI

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan peranan pemerintah dalam proses perencanaan, implementasi, evaluasi kebijakan dan kemampuan pemerintah dalam menggerakkan kebijakan pembangunan khususnya pembangunan SDM (Sumber daya manusia) di Kelurahan tersebut. Sebagai sampel yaitu diambil enam staff Pegawai dikantor Kelurahan, dan delapan tokoh masyarakat, berjumlah 14 Responden.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen atau bebas

Dari penelitian variabel diatas, maka dapat diuraikan dalam definisi operasionalnya sebagai berikut :

1. Peranan pemerintah adalah kegiatan, aktivitas, program pemerintah dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
2. Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan adalah pelaksanaan implementasi maupun proses evaluasi kebijakan dalam peningkatan mutu masyarakat terhadap pembangunan SDM,

kemampuan pemerintah dalam menggerakkan program-program kebijakan pembangunan SDM di tingkat kelurahan, keterlibatan pemerintah dalam memotivasi masyarakat, keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam mengsucceskan kebijakan maupun program pemerintah.

Pembangunan SDM, serangkaian hasil potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya, potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non matrial atau non financial) didalam organisasi, serangkaian kegiatan pengelolaan dan pengorganisasian dari fungsi sumber daya manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Untuk mendapatkan data-data yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian nanti baik data sekunder maupun data primer, maka ditempuh dengan cara-cara yaitu sebagai berikut :

1. Data sekunder, dengan cara mendatangi lokasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu sebagai objek latihan dan penelitian.
2. Data primer, dengan mengadakan wawancara atau dialog secara langsung disamping menggunakan interview (wawancara) kepada para aparat pemerintah setempat yaitu staff yang berada di Kantor Kelurahan, dan beberapa masyarakat yang sudah ditentukan sebagai responden. Kemudian juga digunakan kusioner yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kemudian diedarkan kepada setiap

responden yang sudah ditetapkan terlebih dahulu untuk diisi ataupun dijawab sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau yang terjadi dilapangan.

Teknik analisa data yang dipakai adalah analisa kualitatif. Sedangkan untuk mencari tingkat perbandingan dalam suatu variabel maka digunakan bantuan rumus presentase sebagai berikut :

$$P = F/N \times 100\%$$

Keterangan :

- P : Persentase
- F : Frekuensi jawaban
- N : Jumlah Responden

a. Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Kebijakan Pembangunan SDM Di Kelurahan Tewa

Pemerintah sebagai pelaksana dibidang pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan sehubungan dengan program pembangunan SDM. Dapat dikatakan demikian karena pemerintah diharapkan mampu menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam menunjang keberhasilan dalam proses pembangunan tersebut lewat kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan atau yang dilaksanakannya. Hal yang tidak bisa diabaikan bahwa setiap kebijakan ataupun keputusan dari para pemimpin akan diuji langsung dilapangan karena apakah setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh seorang pemimpin itu benar-benar terlaksanan dengan baik atau setidaknya bisa dirasakan hasil dari kebijakan tersebut atau mungkin kebijakan

yang diluncurkan dapat menyerap aspirasi rakyat atau tidak. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang akan dilaksanakan maupun akan diluncurkan itu benar-benar atau setidaknya dapat menyerap aspirasi dari karena dalam setiap pengambilan keputusan untuk dijadikan suatu kebijakan bersama, maka seseorang pemimpin seperti pemerintah misalnya harus melibatkan masyarakat agar kebijakan tersebut yang nantinya akan dilaksanakan itu dapat menyerap aspirasi dari masyarakat, seperti halnya dalam pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik.

Dalam mengupayakan pelaksanaan pembangunan fisik misalnya maka pemerintah diharapkan sering memonitoring atau memantau langsung dilapangan untuk melihat keberadaan proyek pembangunan fisik tersebut baik yng dilaksanakan di tingkat kelurahan, agar pemerintah di kelurahan bisa mengetahui apakah pembangunan tersebut berjalan dengan sebaiknya atau tidak.Selain itu juga pemerintah dikelurahan harus memperhatikan prioritas pembangunan yang lebih-lebih dirasakan banyak orang atau masyarakat.

Kemudian pembangunan yang dilaksanakan harus diupayakan bagaimana pemerintah dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan keterlibatan masyarakat untuk dapat berusaha sendiri dan ikut serta secara aktif dalam setiap akselerasi pelaksanaan pembangunan demi untuk meningkatkan taraf hidup mereka sehingga masyarakat juga diharapkan tidak terjerat dalam lingkaran kemiskinan.

Keterlibatan masyarakat yang dimaksudkan disini adalah yang diwujudkan melalui keikutsertaan serta partisipasi nyata terhadap pelaksanaan pembangunan SDM dan pada dasarnya masyarakat harus ikut serta dalam proses perencanaan program pembangunan dan diikuti dengan pengambilan keputusan atau sering kita kenal dengan perencanaan dari bawah (bottom up planning) Peran serta masyarakat pada umumnya tentu tidak akan lepas dari setiap pelaksanaan pembangunan karena tanggung jawab pembangunan tidak hanya semata-mata berada di tangan pemerintah saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga, sebab dalam hal ini masyarakat merupakan objek sekaligus subjek daripada pembangunan tersebut.

Dengan demikian maka dibutuhkan keterlibatan, keseriusan dan peran aktif dari pemerintah yang ada dikelurahan sebagai administrator pembangunan dan kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan tersebut.

Dari hasil pengamatan penulis di kelurahan tewan dalam kaitannya dalam penelitian yang penulis lakukan maka sasaran yang penulis lakukan ini untuk melihat tingkat frekuensi peranan pemerintah dalam proses pelaksanaan maupun evaluasi kebijakan pembangunan SDM untuk peningkatan taraf hidup masyarakat

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Menyukseskan Program Pembangunan SDM Yang Dilaksanakan Pemerintah

bahwa masyarakat dalam memberikan partisipasi sehubungan dengan menyukseskan gerak pembangunan SDM yang dilaksanakan di kelurahan Tewan kecamatan ranowulu Kota Bitung adalah dalam bentuk Tenaga karena masyarakat Tewan lebih mengenal kerja secara gotong royong sedangkan partisipasi lainnya dalam bentuk partisipasi harta benda.

Dalam pelaksanaan pembangunan SDM sebenarnya tidak cukup kalau hanya partisipasi tenaga yang lebih banyak diberikan oleh masyarakat karena disamping tenaga yang lebih banyak diberikan oleh masyarakat karena disamping tenaga yang diperoleh masyarakat, ada juga bentuk-bentuk partisipasi lain yang tidak kalah pentingnya dengan partisipasi tenaga yaitu antara lain partisipasi dalam bentuk ide-ide atau pemikiran, dalam bentuk uang atau benda, bahan-bahan material dan terutama dalam hal-hal memelihara hasil-hasil pembangunan SDM, agar pembangunan yang sudah dilaksanakan berhasil dengan baik dan dapat digunakan secara bersama-sama dan bertahan dengan baik.

Partisipasi dalam bentuk ide-ide pemikiran atau usul sangat perlu atau lebih banyak masyarakat berikan agar supaya pembangunan SDM yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan aspirasi atau keinginan langsung dari masyarakat sebab masyarakat pula yang nantinya akan merasakan langsung hasil dari pembangunan tersebut karena masyarakat sendiri yang bersama-sama mengerjakan lewat tenaga maupun dalam bentuk partisipasi lain seperti yang disebutkan diatas. Untuk memperoleh partisipasi yang

secara aktif yang akan diberikan masyarakat tentunya tidak terlepas dari kemampuan seseorang pemimpin seperti dalam hal ini pemerintah harus mempengaruhi dan mengajak langsung masyarakat untuk berpartisipasi terhadap kesuksesan pembangunan.

c. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan

Pemerintah selaku pemimpin suatu daerah harus melakukan upaya-upaya yang tidak merugikan rakyat banyak seperti dalam memahami aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat secara keseluruhan harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal seperti inilah yang selalu mendapatkan maknanya, karena dari segala bentuk kegiatan yang dilakukan baik itu berasal dari jalur pemerintahan, pemimpin maupun secara kemasyarakatan lewat aspirasi yang disampaikan atau diberikan oleh rakyat atau masyarakat, bila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan sesuai dengan harapan, maka pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya akan berjalan dengan baik dan tidak akan menimbulkan dampak yang negative dari masyarakat.

Kemudian dalam proses pelaksanaan kebijakan, pemerintah harus benar-benar dapat mensosialisasikan kepada setiap anggota masyarakat agar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebijakan yang dilaksanakan tersebut dapat terealisasi dengan sebaik-

baiknya, sehingga kebijakan yang sudah dilaksanakan di satu pihak tidak merugikan ataupun menghambat program pemerintah dan di lain pihak juga masyarakat merasa aspirasi mereka didengar dan sekaligus dilaksanakan serta tidak merasa dirugikan oleh pemerintah setempat. Jadi dalam hal ini kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan, baik dalam persoalan waktu maupun pikiran.

Dengan memahami luasnya bidang cakupan pemerintah selaku pemerintah di kelurahan dan mengingat pula keinginan untuk menciptakan koordinasi yang sempurna antara pemerintah dengan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan pemerintah adalah dengan adanya kewibawaan dan gaya kepoloporan yang tinggi untuk diperlihatkan kepada masyarakat yang tercermin dalam diri seorang pemimpin, sehingga mampu menumbuhkan partisipasi aktif tanpa ada paksaan dari siapapun karena merasa tergugah dengan semangat bekerja sama yang diperlihatkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan juga dapat membina masyarakat secara langsung. Dengan cara dapat diadakan pertemuan secara rutin dan berkala antara masyarakat, kepala kelurahan untuk memonitor langsung atau untuk membicarakan serta mendiskusikan masalah-masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluarnya. Sejalan dengan itu, maka pemerintah diharapkan mampu memberikan pemahaman-pemahaman ataupun penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat agar

memahami dan bahkan dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk lebih maksimalnya kemampuan pemerintah dalam pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dan kemasyarakatan, seperti yang penulis jumpai ke beberapa responden waktu mengadakan penelitian di lapangan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan dalam pembangunan, belum sepenuhnya terbuka dan transparan disamping itu juga pemerintah belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat agar memelihara hasil pembangunan yang sudah ada. Oleh karena itu pemerintah diupayakan untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan maupun selalu memperhatikan hal-hal seperti yang disebut diatas, yaitu terutama dalam hal pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan, karena menurut masyarakat yang mereka rasakan itulah yang akan menjadi pegangan mereka misalnya pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara optimal dan terbuka sehingga masyarakat bisa mendapat wawasan yang lebih dalam hal pembangunan sehingga menjadikan mereka aktif.

Selanjutnya pemerintah dapat melakukan atau melaksanakan hal-hal yang erat kaitannya dengan pelaksanaan tugas serta dalam menggerakkan pembangunan, seperti yang tersebut dibawah ini :

1. Pemerintah harus membina komunikasi yang berkesenimbangan dengan bawahan, Pemerintah kelurahan maupun staf kelurahan yang ada dan terutama dengan masyarakat sehingga setiap permasalahan yang ada maupun yang akan timbul dapat dipercepat proses penanganannya.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan maupun pembangunan diupayakan harus transparan dan terbuka dengan masyarakat.
3. Kemudian sehubungan dengan kemampuan pemerintah, lewat kebijakan yang akan dilaksanakan, harus sesuai dengan hasil kesepakatan bersama antara pemerintah kelurahan dan masyarakat agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik.
4. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan, kiranya pemerintah selaku koordinator pembangunan, harus selalu mengadakan pengawasan ataupun pemantauan langsung ke lapangan sehingga proses pengerjaannya dapat berjalan atau selesai dengan baik dan terutama tepat pada waktunya.
5. Pemerintah juga kiranya selalu memperhatikan segala bentuk kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti dalam hal pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah kelurahan.

PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Dalam
Mengimplementasikan Kebijakan
Pembangunan SDM

Di kelurahan Tewaan Kecamatan Ranowulu Kota Bitung khususnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan sudah menunjukkan bahwa pemerintah sudah mempunyai peranan yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan untuk menggerakkan Pembangunan khususnya SDM. karena pemerintah sering melibatkan diri atau sering terjun langsung ke lapangan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pembangunan tersebut karena pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kepentingan masyarakat juga. disamping itu juga pemerintah dijadikan pola panutan yang tinggi sehingga masyarakat merasa terpancing untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap gerak pembangunan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa, pembangunan SDM yang ada dikelurahan Tewaan yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Perekonomian, seperti sekolah, tempat pelayanan kesehatan, industri usaha kecil, tempat membuat usaha kerajinan tangan dan masih banyak yang lainnya. dalam hal ini juga dilihat dari variabel penelitian maka yang telah penulis teliti mulai dari kemampuan pemerintah melaksanakan kebijakan pembangunan SDM, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan, faktor penunjang dalam pelaksanaan kebijakan untuk peningkatan pembangunan SDM serta partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program pembangunan SDM yang dilaksanakan pemerintah,

Maka hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan SDM yang ada dikelurahan Tewaan sudah dikategorikan cukup baik.

Pemerintah telah menjalankan program kebijakan pembangunan SDM dengan sebaik mungkin, pemerintah sudah bisa mendorong masyarakat untuk turut serta secara aktif dalam setiap proses gerak pembangunan. Upaya pemerintah dalam menggali potensi Sumber daya Manusia di tengah masyarakatpun sudah dikatakan baik, karena pemerintah melihat potensi SDM yang begitu besar, itu semua sangat diperlukan pada proses pembangunan untuk itu pemerintah pun tidak segan-segan untuk lebih aktif lagi membaaur secara langsung dengan masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, karena mengingat dapat menguntungkan juga untuk semua Pihak dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadikan masyarakat yang maju dan modern mengikuti Era Globalisasi yang semakin Maju..

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat di kelurahan Tewaan dilihat dari kemampuan pemerintah melaksanakan program pembangunan SDM telah mampu.

Pemerintah selaku aparat telah memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan program pembangunan

yang ditetapkan karena pemerintah dalam hal ini sebagai administrator di bidang pembangunan dan pemerintahan sekaligus administrator dalam bidang kemasyarakatan. Motivasi yang diberikan pemerintah juga ternyata menjadi sangat baik bagi masyarakat karena pemerintah menyampaikan secara langsung serta selalu meningkatkan efektifitas kerja dari setiap aparatur

Peranan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ditunjang juga oleh masyarakat melalui partisipasi aktif yang langsung dalam proses pembangunan dikatakan berhasil. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah sebagai administrator di bidang pembangunan dan kemasyarakatan sudah dapat dikategorikan berhasil, karena pemerintah sering terjun langsung ke lapangan untuk memantau ataupun untuk mengawasi langsung setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Saran

Dari kesimpulan yang ada, disarankan :

1. Mempertahankan pola pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan.
2. Terus melibatkan masyarakat pada setiap tahapan pembangunan.
3. Memfokuskan pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia pada peningkatan taraf hidup masyarakat.
4. Terus membangun komunikasi dengan semua lapisan masyarakat guna menunjang pelaksanaan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif dkk, 2000. *Perencanaan dan evaluasi suatu system untuk proyek pembangunan*. Jakarta : Bina Aksara.

Bryant Coraline dan White Loise G. 1989. *Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. LP3ES.

Dunn William N, 1988. *Analisa kebijaksanaan publik*. Terjemahan Nuhadjir, Yogyakarta

Islamy Irfan, 1989. *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara.

Jones Charles, 0,1991. *Pengantar kebijakan publik*. Editor Nashir Budiman, CV.Rajawali.

Khairudin, 1992, *Pembangunan dan Partisipasi*. BP,Gramedia, Jakarta.

M. A. Wruf, 1995, *Praktek manajemen pemerintahan dalam negeri*, Gramedia Pustaka utama Jakarta.

Ndraha Taliziduhu, 1988. *Metedologi Pemerintahan Indonesia*. Bina Aksara.

Pamudji S, 1986, *kepemimpinan Pemerintah di Indonesia*. Bina Aksara,

Siagian S. P, 1983, *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*, Gunung Agung.

Sudjana, 1975. *Pengantar metodologi penelitian*. UI Jakarta.

Suryaningrat bayu, 1989, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta.

Terry G.R, 1986, *Azaz-azaz Manajemen*. Terjemahan Winardi, Bandung.

Thoha Miftah. 1992, *Dimensi-dimensi prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta.

Tjokroamidjoyo Bintoro, 1991, *Pengantar Administrasi Pembangunan, LP3ES*

Wahab, Abdul, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Rineka Cipta.

Wibawa Samodra Purbokusumo dan Yuyun Pamusinta Agus, 1994, *Evaluasi kebijakan Publik*. PT Raja Grafindo Persada.

Zainun, H, Buchari, 1994, *Administrasi dan Manajemen Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945*, Haji Masagung.

Sumber-sumber lain :

- Undang-undang dasar 1945
- Kamus besar bahasa Indonesia